

**ANALISIS PENDAPATAN NELAYAN PADA SISTEM
BAGI HASIL DAN JENIS ALAT TANGKAP PERIKANAN
DI KOTA TANJUNG BALAI**

TESIS



Oleh :

**TAJUDDIN SIREGAR
NPM : 041802019**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN AGRIBISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 6**

**ANALISIS PENDAPATAN NELAYAN PADA SISTEM
BAGI HASIL DAN JENIS ALAT TANGKAP PERIKANAN
DI KOTA TANJUNG BALAI**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Manajemen Agribisnis (MMA)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh :

**TAJUDDIN SIREGAR
NPM : 041802019**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN AGRIBISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 6**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN AGRIBISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : ANALISIS PENDAPATAN NELAYAN PADA
SISTEM BAGI HASIL DAN JENIS ALAT
TANGKAP PERIKANAN DI KOTA
TANJUNG BALAI**

NAMA : TAJUDDIN SIREGAR

N P M : 041802019

**Menyetujui
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Ir. Edy Batara Mulya Siregar, MS



Ir. Erwin Pane, MS

**Disetujui/Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi,**



Dr. Ir. Edy Batara Mulya Siregar, MS

Direktur,



Drs. Heri Kusmanto, MA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen Agribisnis Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Ir. Edy Batara Mulya Siregar, MS, Ketua Program Studi MMA Pascasarjana UMA yang sekaligus sebagai pembimbing I atas bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan dan penyelesaian tesis.
2. Ir. Erwin Pane, MS sebagai pembimbing II atas bimbingan, arahan dan koreksi dalam penulisan dan penyelesaian tesis.
3. Seluruh staf pangajar dan pegawai pada Program Pascasarjana UMA yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama kuliah di Progam Studi MMA Pascasarjana UMA.
4. Istri tercinta serta putera-puteri kami yang memberikan dorongan, motivasi sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan dengan baik.

5. Orang Tua, Mertua, abang, kakak dan adik-adik yang telah memberikan dorongan serta motivasi kepada penulis sehingga penulisan tesis dapat terselesaikan dengan baik.
6. Rekan-rekan staf Dinas Perikanan dan Kelautan yang telah banyak membantu dan memberikan semangat untuk penyelesaian tesis ini.
7. Teman-teman angkatan II Program Studi MMA Pascasarjana UMA dan kepada semua pihak yang telah membantu sampai selesainya penulisan tesis ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembangunan bidang perikanan dan kelautan di provinsi Sumatera Utara.

Medan, September 2006

Penulis

RINGKASAN

Tingkat kesejahteraan nelayan yang masih relatif rendah dibanding dengan kelompok masyarakat lain di Indonesia tak terkecuali di Sumatera Utara merupakan salah satu wujud nyata bahwa pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan belum berpihak kepada masyarakat pesisir yang sebagian diantaranya adalah nelayan yaitu masyarakat pesisir yang aktif melakukan operasional penangkapan ikan/ hewan air/ tanaman air yang ada di laut.

Sejumlah kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota maupun hingga kini peningkatan taraf hidup nelayan belum sebagaimana yang diharapkan. Berbagai "resep" yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat pesisir khususnya nelayan melalui program pemberdayaan, pengentasan kemiskinan dan program lainnya namun kehidupan nelayan tetap terpuruk. Sedikitnya sejak tahun 1975 pemerintah telah menggunakan 7 (tujuh) pendekatan pembangunan perikanan di Indonesia.

Kondisi ini tentunya kontradiksi dengan keadaan dan potensi pesisir dan lautan yang cukup besar tersebut. Berbagai potensi diantaranya adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya baik budidaya tambak maupun laut, pengolahan hasil perikanan, keanekaragaman ekosistem pesisir (mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuaria) serta kekayaan ekosistem pesisir lainnya seperti bahan tambang (pasir kuarsa, minyak, gas bumi, timah jasa lingkungan untuk pariwisata, perhubungan laut, industri bahari dan jasa lainnya).

Secara umum nelayan mempunyai posisi tawar yang lemah terhadap hasil tangkapannya sendiri. Hal ini berkaitan dengan hidup nelayan itu sendiri yang sehari-harinya sangat tergantung terhadap juragan atau pemilik alias toke. Mulai urusan dapur (untuk makan sehari-hari), kebutuhan sekolah anak, hajatan, kesehatan, kontrakkan rumah dan

lainnya membutuhkan campur tangan sang pemilik. Sebagai konsekuensinya hasil jerih payah menangkap ikan dijual dengan harga yang saja lebih banyak ditentukan oleh pemilik. Sistem demikian ini diduga menjadi salah satu faktor ketidak berdayaan nelayan tradisional dalam mengembangkan dirinya.

Secara umum penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui tingkat pendapatan nelayan yang dibedakan antara pemilik, nakhoda dan ABK berdasarkan alat tangkap yang digunakan di daerah penelitian, (2) Untuk mengetahui berbagai gambaran Sistem Bagi Hasil yang diterapkan antara pemilik, nakhoda dan anak buah kapal (ABK) terhadap alat tangkap yang dipilih dan (3) Untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 tentang Sistem Bagi Hasil Perikanan memberikan pengaruh terhadap pendapatan nelayan dan sejauh mana penerapan Undang-undang Nomor 16 tahun 1964 mengatur hubungan antara pemilik, nakhoda dan anak buah kapal (ABK).

Hasil kajian terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Perikanan di Tanjung Balai menunjukkan bahwa sistem bagi hasil antara nelayan pemilik, nakhoda dan ABK (anak buah kapal) yang berbeda sesuai kebiasaan setempat dan sudah berlangsung secara turun temurun. Sistem bagi hasil berdasarkan kebiasaan setempat untuk ketiga jenis alat tangkap cenderung merugikan nelayan nakhoda dan ABK yang cukup besar. Untuk alat tangkap *purse seine* pendapatan nelayan pemilik lebih besar 17,88% berdasarkan kebiasaan sedangkan untuk nelayan nakhoda dan ABK pendapatannya meningkat >30% bila sistem bagi hasil yang dilaksanakan sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 1964

Pada penggunaan jaring bawal terdapat peningkatan pendapatan terbesar pada kelompok nelayan pemilik bila menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan kebiasaan setempat, sedangkan untuk alat tangkap pukat apung terdapat perbedaan pendapatan yang cukup menyolok pada nelayan pemilik dimana terdapat perbedaan pendapatan di atas 30% bila bagi hasil berdasarkan kebiasaan setempat

Secara umum kondisi pekerjaan dan sumber pendapatan nelayan ABK selain nelayan pada musim paceklik terdapat sumber pendapatan di bidang perikanan lainnya seperti pedagang ikan, mengolah ikan khususnya ikan asin dan terasi. Penyebab kemiskinan nelayan salah satunya disebabkan ketidakadilan pembagian bagi hasil antara nelayan ABK dengan pemilik namun sisi lain nelayan merasakan bahwa pemilik mempunyai andil dalam membantu kehidupan keluarga nelayan.



DAFTAS ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan	5
1.3. Tujuan	5
1.4. Kegunaan	6
1.5. Ruang Lingkup.....	6
1.6. Hipotesis	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
3.1. Sistem Bagi Hasil	9
3.2. Perikanan Laut.....	11
3.3. Nelayan	15
3.4. Alat Tangkap Ikan.....	16
3.5. Kapal Penangkapan Ikan	17
3.6. Peraturan-peraturan.....	19
3.7. Tenaga Kerja	20
3.8. Pendapatan	22
3.9. Biaya Operasional	23
III. METODE PENELITIAN	24
2.1. Lokasi.....	24
2.2. Metode Pengumpulan Data	25
2.3. Analisis Data	26
2.4. Definisi Operasional.....	27
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	30
4.1. Perairan Sumatera Utara.....	30
4.2. Pantai Timur	32
4.3. Kota Tanjung Balai	34
4.4. Identifikasi Alat Tangkap	38
4.5. Pendapatan Nelayan dan Uji Beda Rata-rata	42
4.5.1. Alat Tangkap Purse Seine	44
4.5.2. Alat Tangkap Jaring Bawal	48

4.4.3. Alat Tangkap Pukat Apung	51
V. KESIMPULAN	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran	56
VI. DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	60



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat sekitar 3,2 juta rumah tangga nelayan. Jika setiap keluarga beranggotakan 5 (lima) orang maka jumlah masyarakat nelayan tersebut sekitar 16 juta orang. Dari jumlah tersebut di atas sekitar 70% hidup di bawah garis kemiskinan. Kekayaan dan keanekaragaman sumber daya hayati yang terdapat di wilayah pesisir dan laut seyogianya diarahkan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat pesisir yang sebagian besar nelayan khususnya nelayan tradisional. Landasan konstitusional dari pernyataan ini jelas sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, dimana negara menjamin kehidupan yang layak bagi rakyatnya.

Tingkat kesejahteraan nelayan yang masih relatif rendah dibanding dengan kelompok masyarakat lain di Indonesia tak terkecuali di Sumatera Utara merupakan salah satu wujud nyata bahwa pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan belum berpihak kepada masyarakat pesisir yang sebagian diantaranya adalah nelayan yaitu masyarakat pesisir yang aktif melakukan operasional penangkapan ikan/ hewan air/ tanaman air yang ada di laut.

Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengangkat taraf hidup nelayan khususnya nelayan tradisional dari sistem penyaluran bantuan, jenis bantuan baik dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang, model pemberdayaan, bentuk pendampingan, kredit

rumah dan lain sebagainya namun kehidupan para nelayan tetap memprihatinkan. Nelayan di negeri ini menjadi lambang kemiskinan dari masa ke masa. Secara visual kondisi ini yang secara umum ditandai dengan rendahnya tingkat pendapatan, pendidikan anak-anak nelayan relatif rendah dan lingkungan pemukiman yang kumuh.

Sejumlah kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota maupun hingga kini peningkatan taraf hidup nelayan belum sebagaimana yang diharapkan. Berbagai "resep" yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat pesisir khususnya nelayan melalui program pemberdayaan, pengentasan kemiskinan dan program lainnya namun kehidupan nelayan tetap terpuruk.

Sedikitnya sejak tahun 1975 pemerintah telah menggunakan 7 (tujuh) pendekatan pembangunan perikanan di Indonesia yaitu :

1. Pendekatan orientasi produksi (*product oriented*), yang ditandai dengan kebijakan program motorisasi kapal ikan dan modernisasi peralatan tangkap
2. Pendekatan pemasaran rantai dingin (*cool chain sistem*) yaitu suatu pendekatan yang berusaha menghadirkan ikan segar ke konsumen
3. Pengembangan kelembagaan (*institution building*) yaitu dengan mengembangkan Koperasi Unit Desa (KUD) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk mendongkrak masalah permodalan dan pemasaran
4. Pendekatan INTAM

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, A. 1975. Ilmu Usaha Tani. Alumni Bandung
- BPS, Medan Dalam Angka. 2003. Biro Pusat Statistik Kota Medan. Medan
- BPS, Tanjung Balai Dalam Angka. 2003. Biro Pusat Statistik Kota Tanjung Balai Tanjung Balai
- BPS, Sibolga Dalam Angka. 2003. Biro Pusat Statistik Kota Sibolga. Sibolga
- Daniel, M. 2001. Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Bumi Aksara. Jakarta
- Darus dkk. 1997. Pembangunan Desa Pantai Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Agribisnis, Fakultas Ekonomi USU. Medan
- Departemen Kelautan dan Perikanan 2001. Naskah Akademi Pengelolaan Wilayah Pesisir. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Jakarta
- Hannesson, R. 1976. Ekonomi Perikanan. Universitas Forlaget, diterbitkan kembali oleh Universitas Indonesia (UI-PRESS). Jakarta
- Kusnadi, 2004. Polemik Kemiskinan Nelayan. Pondok Edukasi & Pokja Pembaruan. Bantul
- Kusumastanto, T. 2003. Ocean Policy Dalam Membangun Negeri Bahari di Era Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Marbun, L. dkk. 2002. Masyarakat Pinggiran Yang Kian Terlupakan. JALA. Medan
- Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial. Jakarta
- Salim A. 1999. Analisis Tingkat Pendapatan Petani Tambak dan Nelayan Serta Faktor Yang Mempengaruhinya di Kecamatan Syah Kuala Kotamadya Banda Aceh, Tesis Program Pascasarjana Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan USU. Medan
- Sandy I. M. 1982. Pembangunan Wilayah Publikasi Nomor 188. Direktorat Jenderal Agraria, Departemen Dalam Negeri. Jakarta

- Santosa, DJ. 2004. Pkok-pokok Hukum Perkapalan. UII Press. Jogjakarta
- Sinungan, M. 2000. Produktivitas Apa dan Bagaimana. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soekartawi, dkk. 1986. Ilmu Usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil. Universitas Indonesia (UI-PRESS). Jakarta
- Soekartawi. 2002. Analisis Usaha Tani. Universitas Indonesia (UI-PRESS). Jakarta
- Soeroto. 1983. Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja. Gajah Mada University Press. Yogyakarta